

**PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH
KOTA PADANGPANJANG**

*The Effect Of Human Resources, Application Of Government Accounting Standards
And Accounting Information Systems On The Quality Of Financial Reports In The
Government Of The City Of Padang Panjang*

Oktriana Arza; Yulia Syafitri; Delori Nancy Meyla

Fakultas Ekonomi Universitas Ekasakti Padang

E-mail : arzaoktriana@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh (1) sumber daya manusia (2) penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan (3) sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Padang Panjang. Variabel independent dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan sistem informasi akuntansi dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Padang Panjang sebagai variabel dependent.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) SDM berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah namun tidak signifikan. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai t hitung = $0,245 < t$ tabel = $1,99773$ dengan nilai signifikansi ($0,808 > 0,05$), koefisien regresi = $0,061$, (2) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas LKPD namun tidak signifikan. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai t hitung = $1,018 < t$ tabel = $1,99773$ dengan nilai signifikansi ($0,313 > 0,05$), koefisien regresi = $0,161$ (3) Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas LKPD. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai t hitung = $5,194 > t$ tabel = $1,99773$ dengan nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$), koefisien regresi = $0,744$

Kata kunci : sumber daya manusia, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, sistem informasi akuntansi, kualitas laporan keuangan

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of (1) Human Resources (2) Implementation of Government accounting standards and (3) accounting information system to the quality of financial report of the city of Padang Panjang area. The independent variable in this study is human resources, the implementation of the government accounting standards, and accounting information system and quality of the government's financial report area of Padang Panjang as variable dependent.

The results showed that: (1) SDM had an effect on the quality of regional financial statements but not significant. It is evidenced by the value of t count = $0.245 < t$ table = 1.99773 with significance value ($0,808 > 0.05$), regression coefficient = 0.061 , (2) Implementation of Government accounting standards affects the quality of LKPD but not significant. It is evidenced by the value of t count = $1.018 < t$ table = 1.99773 with significance value ($0.313 > 0.05$), regression coefficient = 0.161 (3) Accounting information system significantly affects the quality of LKPD. It is evidenced by the value of t count = $5.194 > T$ table = 1.99773 with significance value ($0,000 < 0.05$), regression coefficient = 0.744

Keywords : human resources, implementation of Government accounting standards, accounting information System, financial report quality

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Meningkatnya kesadaran publik akan pentingnya peranan pemerintah dalam pelayanan dan peningkatan kinerja, mendorong pemerintah untuk menerapkan sistem pemerintahan yang baik (*Good government governance*). Salah satu indikasi dari terselenggaranya pemerintahan yang baik dapat dilihat dari penerapan akuntabilitas publik pada suatu entitas pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan antara lain dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*).

Upaya dalam mewujudkan kualitas laporan keuangan yang baik tak lepas dari sumber daya manusia yang memiliki peran penting di dalam organisasi karena dapat meningkatkan kinerja organisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan selanjutnya sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Daerah (Pemda). Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan sebelumnya menunjukkan peran penting SDM terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan Zuliarti (2012) diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Sistem Informasi Teknologi dan Sistem pengendalian *intern* terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.

Selain Sumber Daya Manusia, dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, merupakan upaya nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, dengan adanya SAP maka laporan keuangan pemerintah pusat/daerah akan lebih berkualitas (laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para *stakeholder* pemerintah antara lain: investor, kreditor dan masyarakat pada umumnya dalam rangka tranparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Berdasarkan penelitian oleh Junnaini (2012), Kusumah (2012) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Selain itu, penelitian terkait juga pernah dilakukan Sihombing (2011) di mana hasil penelitian menunjukkan bahwan menyajikan laporan keuangan penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Selain itu juga dibutuhkan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk membantu pengelolaan data yang lebih cepat, efektif dan efisien.

Menurut Yuliani dkk (2010) rendahnya kualitas laporan keuangan dapat disebabkan oleh pemahaman akuntansi dari penyusun laporan keuangan itu sendiri, belum diterapkannya secara optimal sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan atau lemahnya peran internal audit.

Pada penjelasan Peraturan Pemeritah No 56 tahun 2005 juga disebutkan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan

kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Saat ini OPD di Kota Padang Panjang telah memanfaatkan teknologi informasi atau aplikasi yang menghasilkan suatu sistem informasi akuntansi, dimana menyediakan informasi mengenai keuangan daerah yang dapat diakses, dikelola dan didayagunakan oleh berbagai pihak dan masyarakat luas. Sistem tersebut dikenal dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Sistem Informasi Akuntansi mengacu pada Peraturan Pemerintah No 56 tahun 2005 yang direvisi oleh Peraturan Pemerintah No 65 tahun 2010, aturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 13 tahun 2006 yang telah direvisi sebanyak dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem ini berbasis pada jaringan komputer yang mampu menghubungkan dan mampu menangani konsolidasi data antara Organisasi Perangkat Daerah (di singkat OPD) dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) sehingga data di Pemerintah Daerah dapat terintegrasi dengan baik.

Pemerintah daerah Kota Padang Panjang, dalam pelaksanaan keuangan daerah telah menggunakan prinsip-prinsip akuntansi keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang disyaratkan. Indikasi capaian pelaksanaan akuntansi keuangan daerah dapat dilihat dari opini pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dimana Kota Padang Panjang dalam 5 tahun terakhir 3 kali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelas dan 2 kali mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WPD).

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat dikatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum sepenuhnya memenuhi kriteria kualitas informasi yang disyaratkan. Jika laporan keuangan daerah belum memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan perundang-undangan hal ini memungkinkan terjadinya kerugian negara, berkurangnya potensi dan pendapatan, ketidakefisienan, ketidakefektifan, kelemahan administrasi dan ketidakhematan.

Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Padang Panjang”**

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah SDM di bidang keuangan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Padang Panjang
2. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Padang Panjang
3. Apakah Sistem Informasi Akuntansi mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Padang Panjang.
4. Apakah Sumber Daya Manusia, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi secara simultan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Padang Panjang

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh SDM di bidang keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Padang Panjang
2. Mengetahui pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Padang Panjang
3. Mengetahui pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Padang Panjang
4. Mengetahui pengaruh SDM, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Padang Panjang.

TINJAUAN PUSTAKA

Sumber Daya Manusia

SDM merupakan faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dipisahkan dari organisasi. Lembaga dan perusahaan. Pada hakikatnya Sumber Daya Manusia adalah individu produktif yang diperkerjakan di sebuah organisasi atau institusi sebagai penggerak, pemikir dan perencana dan memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dikelola, dilatih dan dikembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi

Hullah *et al* (2012) menjelaskan bahwa sumber daya manusia merupakan orang yang siap, mau dan mampu memberi serta berdonasi untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Zuliatri (2012), kompetensi SDM adalah kompetensi Individu atau perseorangan, organisasi (institusi) atau sistem yang menjalankan fungsi, atau Kekuatan untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Jadi Sumber Daya Manusia adalah orang yang bekerja pada suatu organisasi atau perusahaan yang merupakan salah satu faktor sangat penting yang harus dikelola, dilatih dan dikembangkan kemampuannya agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya demi tercapai segala tujuan organisasi atau perusahaan yang telah ditetapkan.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

SAP merupakan sebuah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan serta pelaporan keuangan pemerintah. Oleh karena itu, SAP merupakan persyaratan dengan pengaruh hukum internal Upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan Indonesia (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005). Menurut Bastian (2010) terdapat hubungan terkait antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Dan memberikan laporan keuangan pemerintah sehingga SAP memiliki persyaratan yang dapat diberlakukan secara hukum Upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia. SAP diimplementasikan dalam lingkup pemerintahan yaitu Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan organisasi pemerintah pusat ataupun daerah. Tentang standar akuntansi pemerintah Siapkan dan serahkan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan mutlak yang harus diperhatikan Digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan Indonesia (PP No. 71 Tahun 2010)

Standar Akuntansi Pemerintahan di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Jadi Standar Akuntansi Pemerintahan adalah persyaratan yang berkekuatan hukum dituangkan dalam Peraturan Pemerintah berisi prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi dikumpulkan dalam suatu perusahaan atau organisasi, Mengkategorikan, memproses, menganalisis, dan mengkomunikasikan informasi dan pengambilan keuangan Keputusan dibuat oleh pihak eksternal dan internal perusahaan atau organisasi. Sistem informasi adalah bagian yang tak actor dipisahkan dari akuntansi, karena akuntansi itu sendiri mengandung siklus yang merupakan bentukan dari suatu actor.

Menurut Soudani dkk (2012) Sistem Informasi Akuntansi adalah alat yang ketika dimasukkan ke dalam bidang informasi dan actor teknologi (IT), yang dirancang untuk membantu dalam pengelolaan dan pengendalian actor dengan organisasi ekonomi daerah keuangan. Sistem informasi akuntansi adalah komponen dan elemen dari suatu organisasi yang menyediakan informasi bagi pengguna dengan pengolahan peristiwa keuangan (Zare *et al*,2012).

SIA memberikan kesempatan bagi pebisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan sehingga memungkinkan perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif (Edison *et al*, 2012).

Jadi dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi adalah actor informasi yang menggunakan teknologi berbasis komputerisasi, dioperasikan oleh sekelompok orang untuk mengumpulkan dan mengolah data yang berhubungan dengan transaksi dalam siklus akuntansi dan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan yang akan dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan atau organisasi.

Pemanfaatan suatu teknologi system informasi yang dirasakan oleh pengguna dapat diukur dari beberapa faktor berikut (Meuthia, 2008) dalam Gusforni (2011):

1. Penggunaan teknologi dapat menimbulkan produktivitas pengguna,
2. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan kinerja pengguna,
3. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi proses pengguna.

Dimensi tentang pemanfaatan teknologi informasi meliputi (Arief: 2012):

- a. Mempertinggi efektivitas
- b. Menjawab kebutuhan informasi
- c. Meningkatkan kinerja
- d. Meningkatkan efesiensi

Sistem Informasi Akuntansi pada pemerintah mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 56 Tahun 2005 yang telah direvisi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010.

Sistem Informasi Keuangan Daerah

SIKD merupakan Suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data keuangan daerah dan data relevan lainnya menjadi informasi yang diberikan kepada publik dan menjadi dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sistem pertanggungjawaban pemerintah daerah. dalam PP RI No. 56 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 16.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

SIPKD (sistem informasi pengelolaan keuangan daerah) suatu aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable.

Laporan Keuangan

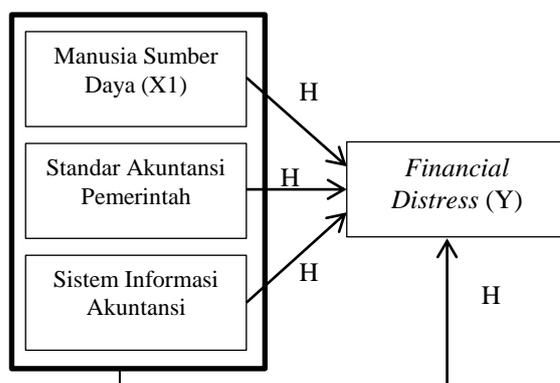
Menurut Munawir (2015:5), laporan keuangan merupakan proses akuntansi yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengelola data keuangan. Laporan keuangan suatu laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau periode berikutnya dan pelaporan keuangan dapat dikatakan sebagai data yang dapat dikatakan sebagai informasi.

Kualitas laporan Keuangan

Menurut Elvin (2017) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebuah tingkat atau derajat pelaporan Akuntabilitas pengelolaan keuangan, memberikan informasi tentang status keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh pemerintah di wilayah dasar laut. Sedangkan menurut Mardiasmo (2010) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah adalah laporan keuangan yang mampu menyajikan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan.

Jadi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang memberikan informasi posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan pemerintah dalam suatu periode dan entitas pelaporan yang disajikan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku

Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan dengan menggunakan bantuan instrumen angket (kuesioner). Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis kepada responden dengan memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden menurut Sugiyono (2014). Kuesioner yang peneliti gunakan adalah hasil adopsi dari penelitian sebelumnya.

Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Agussalim Manguluang (2010) penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam yaitu data primer. Data primer data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dengan melakukan wawancara dan memberikan kuisisioner kepada Kabid akuntansi, Kasi Akuntansi dan Verifikasi, Kasubag Keuangan dan staf dibawah bagian keuangan.

Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Agussalim (2010:94) populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.

Populasi dalam penelitian ini adalah Kasubag Keuangan, Sekretariat PPK, Bendahara Pengeluaran di 21 OPD dan 2 Kecamatan serta 3 Pejabat Stuktural Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan BPKD, namun pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup populasi hanya 2 orang, karena penulis adalah salah satu dari jabatan yang diteliti yaitu sekretariat PPK.

Sampel adalah bagian dari ukuran dan karakteristik populasi menurut Sugiyono (2014). Dalam penelitian ini untuk menentukan jumlah sampel yang dapat menggambarkan populasi, digunakan metode *total sampling* karena populasi kurang dari 100 (seratus).

Jadi jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 71 responden.

Metode Analisis Data

Metode analisis berganda merupakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian tidak dilakukan uji validitas karena kuisisioner bersumber dari penelitian terdahulu yang sudah dilakukan uji validitas dan dinyatakan valid.

Sebelum melakukan analisa dan pengujian hipotesis dilakukan uji statistik sebagai berikut :

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menjelaskan data yang dikumpulkan sebagaimana adanya, dan tidak bermaksud untuk membuat kesimpulan apa pun Cocok untuk generalisasi dan generalisasi Menurut Sugiyono (2014:206). Dalam statistik deskriptif terdapat gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*) standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewness* (Gozali 2011).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Agussalim Manguluang (2016), uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak dilakukan

uji one sample *kolmogrov-sminov* yang dianalisis menggunakan program *SPSS*. Berdistribusi normal dengan nilai signifikansi $> 0,05$.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji model regresi apakah terdapat korelasi antara variabel independen. Menurut Agussalim Manguluang (2016:112) pada model regresi linear yang baik tidak boleh terdapat multikolinieritas diantara variabel-variabel bebas di dalam model. Nilai multikolinieritas dapat dilihat pada nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan toleransi, jika nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Agussalim Manguluang (2016:113), uji heteroskedastisitas digunakan untuk mendeteksi terjadinya heteroskedastisitas ditunjukkan dengan adanya ketidaksamaan varian nilai residualnya antara variabel-variabel bebas yang dapat dideteksi melalui perhitungan uji koefisien korelasi *rank Spearman* dan grafik.

Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada/tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatter Plot*. Untuk menguji ada atau tidak heteroskedastisitas dapat ditunjukkan bahwa koefisien korelasi dari seluruh variabel bebas adalah lebih kecil dari 0.05.

Metode Pengujian Hipotesis

Analisis regresi linear berganda

Penelitian ini menggambarkan hubungan dimana satu atau lebih variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Menurut Agussalim Manguluang (2016:81), regresi linier berganda yaitu dimana variabel terikatnya (Y) dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel (X). Berikut persamaan regresi linear berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel x dapat menjelaskan variabel y, baik secara parsial maupun secara simultan. Nilai *R square* yang kecil memperlihatkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksikan variabel-variabel dependen.

Uji T (Parsial)

Menurut Ghozali (2016:98) Uji t (t-test) digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha=5\%$) Dasar pengambilan keputusan digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai probabilitas signifikan $\geq 0,05$, maka hipotesis ditolak. Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai probabilitas signifikan $< 0,05$, maka hipotesis diterima. Mempunyai arti bahwa variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y

Uji F (Simultan)

Uji Simultan (Uji F) bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Ghozali (2016:99) Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Pengambilan keputusan dalam pengujian ini bisa dilaksanakan dengan menggunakan nilai probability value (p value) maupun F hitung. Untuk menguji hipotesis ini digunakan p value atau Fhitung dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Jika $p \text{ value} < 0.05$ atau $F_{hitung} \geq F_{table}$ maka H_a diterima
2. Jika $p \text{ value} \geq 0,05$ atau $F_{hitung} < F_{table}$ maka H_a ditolak

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden Deskripsi Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 71 rangkap dan dikembalikan sebanyak 67 rangkap jadi terdapat 4 rangkap kuesioner yang tidak terisi. Karena kuesioner tersebut harus diberikan langsung kepada responden sementara terdapat responden yang tidak berada ditempat karena sedang cuti ketika peneliti melakukan penelitian serta kekosongan jabatan

Gambaran yang di peroleh tentang Ringkasan penyebaran dan pengembalian kuesioner penelitian ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1
Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	%
Kuesioner yang disebar	71	100 %
Kuesioner yang tidak kembali	-	-
Kuesioner yang tidak diisi	4	5.63%
Kuesioner yang dapat diolah	67	94.37 %

Sumber: Data diolah peneliti (2019)

Tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat respon dari kuesioner yang sudah disebar diperoleh hasil kuesioner yang kembali dan hasil data yang dapat digunakan dan diolah adalah sebesar 100% .

Deskripsi Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Padang Panjang yang berkaitan langsung dengan keuangan dan akuntansi. Penulis mengelompokan karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu menurut jenis kelamin, usia dan pendidikan. Berikut ini disajikan karakteristik responden menurut jenis kelamin, usia, pendidikan.

a. Jenis Kelamin

Hasil olah data untuk jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	17	25,37 %
Perempuan	50	74,63 %
Total	67	100 %

Sumber :Data diolah peneliti (2019)

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah responden yang paling banyak adalah responden yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 50 orang atau sebesar 74,63% Sedangkan Jenis kelamin laki-laki sebanyak 17 orang atau sebesar 25,37%

b. Usia

Karakteristik responden penulis bagi ke dalam 4 (empat) kelas yaitu:

- Kelas 1 : usia 20 - 30
- Kelas 2 : usia 31 – 40
- Kelas 3 : usia 41 – 50
- Kelas 4 : usia > 50

Hasil olah data untuk dari tingkat usia responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Tingkat Usia Responden

No.	Usia	Frekuensi	Persentase
1	20 – 30	7	10,45 %
2	31 – 40	32	47,76 %
3	41 – 50	23	34,33 %
4	>51	5	7,46 %
	Jumlah	67	100 %

Sumber: Data diolah peneliti (2019)

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden yang memiliki usia berkisar antara 20-30 tahun sebanyak 7 orang (10,45%), responden yang memiliki usia 31-40 tahun sebanyak 32 orang (47,76%), responden dengan usia 41-50 tahun sebanyak 23 orang (34,33%) sedangkan yang memiliki usia 51 tahun keatas hanya sebanyak 5 orang (7,46%). Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa Pegawai yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan akuntansi pada OPD di Kota Padang Panjang berada pada usia produktif yaitu berkisar antara 20 s/d 50 tahun.

c. Pendidikan/Jurusan

Aspek pendidikan sangat penting bagi seseorang, orang yang berpendidikan lebih tinggi secara umum mempunyai peluang yang lebih besar untuk dapat bekerja secara efisien dan efektif. Pengelompokan responden berdasarkan pendidikan dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4
Pendidikan Responden

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
SMA/ Sederajat	6	8,96 %
Diploma III (D.III)	16	23,88 %
Strata 1 (S.1)	39	58,21 %
Pasca Sarjana (S.2)	6	8,96 %
Jumlah	67	100%

Sumber : data diolah peneliti (2019)

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa responden yang berpendidikan SLTA sebanyak 6 orang (8,95%). Responden yang berpendidikan Diploma III sebanyak 16 orang (23,88%). Responden yang berpendidikan S1 sebanyak 39 orang (58,21%) Sedangkan reponden yang berpendidikan S2 sebanyak 6 orang (8,96%). Hal ini menunjukkan bahwa responden pegawai OPD yang terlibat pada bagian keuangan dan akuntansi di Kota Padang Panjang lebih dari 60 % berpendidikan S1 dan S2. Sedangkan Pengelompokan responden berdasarkan Jurusan/ latar belakang pendidikan pendidikan dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Jurusan/ Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan	Jurusan	Jlh	%	Akuntansi/ Ekonomi	
				Jlh	%
SMA/ SMK	Akuntansi	3	4,48 %	3	4,48 %
	SMA/Umum	3	4,48 %		
D III	Akuntansi	10	14,93%	10	14,93%
	Keuangan	2	2,99%		
	Manajemen	1	1,49%		
	DII	3	4,48%		
S1	Akuntansi	14	20,90%	14	20,90%
	Ekonomi pembangunan	1	1,49%		
	Manajemen	3	4,48%		
	Hukum	8	11,94%		
	Sosial	4	5,97%		
	DII	9	13,43%		
S2	Akuntansi	5	7,46%	5	7,46%
	DII	1	1,49%		
	Jumlah	67	100%		

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui jumlah responden yang berasal dari SMK Akuntansi sebanyak 3 orang (4,48%), Diploma III Akuntansi sebanyak 10 orang (14,93%), S1 Akuntansi sebanyak 14 orang (20,90%) dan S2 Akuntansi sebanyak 5 orang (7,46%) jadi total responden yang memiliki latar belakang pendidikan dengan jurusan akuntansi adalah sebanyak 32 orang atau sebesar 47,76% sehingga memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik. Walaupun demikian kurangnya sarjana akuntansi yang menjadi pengelola keuangan daerah hendaknya jadi perhatian Pemerintah Daerah ke depannya untuk dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, transparan, efektif dan efisien serta sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Hasil Uji Instrumen Data

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Untuk menguji normalitas dalam penelitian ini dengan menggunakan uji *Komologrof Simirnov*, dengan uji ini dapat diketahui data yang digunakan distribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan untuk Kolmogrov- Smirnov yaitu nilai value pada kolom *Asymp. Sig (2-tailed) > level of significant* ($\alpha = 5\%$). Hasil pengujian normalitas ditampilkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.6
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

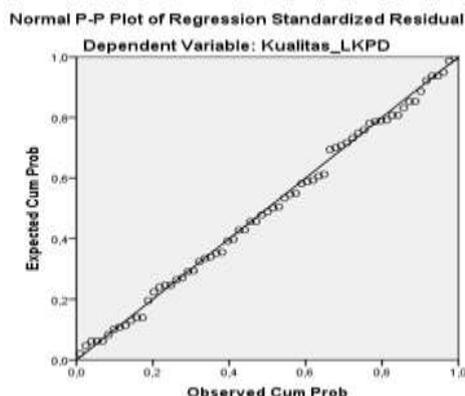
		Unstandar dized Residual
N		67
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,4265275
		5
Differences	Positive	,045
	Negative	-,041
Test Statistic		,045
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber : Data diolah peneliti (2019)

Pada data pada Tabel 4.6 diperoleh nilai *Asymp. Sig.* sebesar 0.200. Karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05, dengan memenuhi asumsi normalitas.

Jika titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut telah normal. Berikut adalah gambar grafik Normal P-P Plot yang diolah dengan SPSS 23:

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas



Sumber : Data diolah penulis (2019) menggunakan SPSS v 23

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui korelasi atau hubungan yang terjadi antara satu variabel independen dengan variabel independen lainnya. Metode untuk menguji adanya multikolinieritas dilihat dari nilai *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF). Berikut hasil pengujian multikolinieritas pada tabel di bawah ini:

Tabel 7

Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
SDM	,757	1,320
Penerapan_SAP	,827	1,209
SIA	,894	1,118

Sumber : Data diolah peneliti (2019) menggunakan SPSS v 23

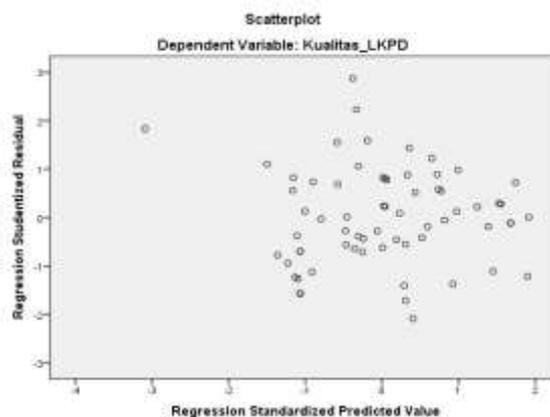
Dari tabel 7 menunjukkan bahwa penelitian ini bebas dari adanya gejala multikolinieritas. Variabel independen, Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Sistem Informasi Akuntansi masing-masing memiliki nilai toleransi di atas 0,10. Nilai toleransi Sumber Daya Manusia sebesar 0,757; Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebesar 0,827; dan Sistem Informasi Akuntansi sebesar 0,894. Jika dilihat dari nilai VIF, masing-masing variabel independen lebih kecil dari 10 yaitu Sumber Daya Manusia memiliki VIF 1,320; Penerapan SAP memiliki VIF 1,209; dan Sistem Informasi Akuntansi memiliki VIF sebesar 1,118. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada semua variabel bebas (independen) karena nilai toleransi tiap variabel bebas > 0,1 dan nilai VIF < 10.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dengan kata lain varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain setiap variabel penelitian ini berbeda satu dan lainnya.

Dalam melakukan pengujian heteroskedastisitas, dapat dilakukan melalui analisis grafik dengan cara membaca grafik *Scatterplot*, di mana tidak terjadi heteroskedastisitas apabila titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, dan tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Berikut adalah gambar scatter plot dari uji Heteroskedastisitas yang diolah dengan SPSS 23

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data diolah peneliti (2019)menggunakan SPSS v 23

Dari gambar scatter plot di atas dapat dilihat bahwa tidak terdapat pola tertentu yang jelas, dan titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dari hasil pengolahan data di atas disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi yang akan dilakukan terhadap variabel-variabel dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur pengaruh antara variabel dependen yaitu Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Daerah dengan beberapa variabel independen yaitu Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Informasi Akuntansi. Hasil pengujian regresi linear berganda dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
Model (Constant) SDM	12,931	8,903
Penerapan_SAP	,061	,251
SIA	,161	,158
	,744	,143

Sumber : data diolah peneliti (2019)menggunakan SPSS v 23

Dari tabel 4.8 diperoleh hasil dari regresi berganda yaitu :

$$Y = 12,931 + 0,061(\text{SDM}) + 0,161(\text{SAP}) + 0,744 (\text{SIA})$$

Dari persamaan regresi diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- Hasil persamaan regresi, nilai konstanta sebesar 12,931, artinya kompetensi SDM (X1), penerapan SAP (X2), dan SIA (X3) dianggap konstan maka tingkat kualitas laporan Keuangan konstan sebesar sebesar 12,931.
- Koefisien regresi SDM (Sumber Daya Manusia) sebesar 0,061 yang artinya terdapat pengaruh positif antara sumber daya manusia dengan kualitas informasi pelaporan keuangan daerah, apabila SDM naik sebesar satu satuan maka akan menyebabkan kenaikan kualitas laporan keuangan daerah sebesar 0,061 satuan, bila variabel independen lainnya konstan.
- Koefisien regresi Penerapan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) sebesar 0,161 yang artinya terdapat pengaruh positif antara standar akuntansi pemerintahan dengan kualitas laporan keuangan daerah, apabila Penerapan SAP naik sebesar satu satuan maka akan menyebabkan penambahan kualitas laporan keuangan daerah sebesar 0,161 satuan, bila variabel independen lainnya konstan.
- Koefisien regresi Sistem Informasi Akuntansi sebesar 0,744 yang artinya terdapat pengaruh positif antara system informasi akuntansi dengan kualitas laporan keuangan daerah, apabila SIA naik sebesar satu satuan maka akan menyebabkan penambahan kualitas laporan keuangan daerah sebesar 0,744 satuan, bila variabel independen lainnya konstan.

Uji R² (Koefisien Determinan)

Uji Koefisien Determinasi (R²) bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel x dapat menjelaskan variabel y, baik secara parsial maupun secara simultan. Nilai R *square* yang kecil memperlihatkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel sangat terbatas.

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summaryb

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,596 ^a	,355	,324	3,507

a. Predictors: (Constant), SIA, Penerapan_SAP, SDM

b. Dependent Variable: Kualitas_LKPD

Sumber : data diolah peneliti (2019)menggunakan SPSS 2)

Dari tabel diatas, diperoleh nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,324. Hal ini berarti varians Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi dapat menjelaskan Kualitas Laporan Keuangan sebesar 32,4%. Sedangkan sisanya sebesar $100\% - 32,4\% = 67,6\%$ dijelaskan oleh variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Uji t (Parsial)

Uji signifikansi parameter individual (Uji t) dilakukan untuk menguji apakah suatu variabel independen Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi secara parsial berpengaruh signifikan atau tidak terhadap

variabel kualitas laporan keuangan. Dimana besarnya α yang digunakan dalam uji ini adalah 5% ($\alpha = 0,05$). Berikut pengambilan keputusan dalam pengujian dalam uji t :

- jika $p \text{ value} < 0,05$ atau $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka terdapat pengaruh signifikan variabel X terhadap variabel Y.

- Sebaliknya, jika $p \text{ value} \geq 0,05$ atau $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh signifikan variabel X terhadap Y

Sebelumnya terlebih dahulu harus dicari nilai t tabel dengan rumus sebagai berikut:
 $t(\alpha/2):(N-k-1) = t(0,025;63) = 1,99834$

t tabel = Dengan $n = 67$; $(k-1) = 3$; $t\text{-tabel} = 0,025: (67- 3)$. Sehingga nilai t-tabel adalah 1,99773.

dimana : $\alpha =$ konstanta (tingkat signifikansi) yaitu 0,05

$n =$ Jumlah sampel

$k =$ Jumlah Variabel

Pada penelitian ini uji t digunakan untuk menguji H1, H2, H3, Berikut hasil dari pengujian Uji t yang dilakukan:

Tabel 4.10
Hasil Uji t (Parsial)

Model	T	Sig.
1 (Constant)	1,452	,151
SDM		
Penerapan_SAP	,245	,808
SIA	1,018	,313
	5,194	,000

Sumber : Data diolah peneliti (2019) menggunakan SPSS 23, Lampiran 12

Dari tabel 4.10 diatas hasil perhitungan uji-t dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Variabel Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Daerah.

Hasil pengujian Sumber Daya Manusia (SDM) diperoleh nilai t hitung sebesar 0,245 lebih kecil dari 1,99773 yang merupakan nilai t tabel. Tingkat signifikansi menunjukkan 0,808 yang lebih besar dari taraf signifikansi 5 %. Hal ini berarti menolak H1 dan dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

2. Pengaruh Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Daerah.

Hasil pengujian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diperoleh nilai t hitung sebesar 1,018 atau kecil dari t tabel. Tingkat signifikansi menunjukkan 0,313 yang lebih besar dari taraf signifikansi 5%. Hal ini berarti tidak menerima H2 (ditolak) dan dapat disimpulkan bahwa Penerapan SAP berpengaruh tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

3. Pengaruh Variabel Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Terhadap Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Daerah.

Hasil pengujian Sistem Informasi Akuntansi (SIA) diperoleh nilai t hitung sebesar 5,194 atau lebih besar dari nilai t tabel. Tingkat signifikansi menunjukkan 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 5 %. Hal ini berarti menerima H3 dan dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Dengan kata lain hipotesis ketiga yang menyatakan "Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Daerah" **diterima**.

Uji F (Simultan)

Uji Simultan (Uji F) digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas (independen) yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama sama (simultan) atau tidak terhadap variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Pada penelitian ini uji F digunakan untuk menguji hipotesis keempat (H4) yaitu: Diduga Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Dimana besarnya α yang digunakan dalam uji ini adalah 5% ($\alpha = 0,05$). Nilai F tabel diperoleh dengan melihat kedalam tabel frekuensi F, yang sebelumnya harus dihitung terlebih dahulu dengan rumus:

F tabel = F(df1;df2) Dengan $n = 67$; $df1 = (k-1) = (4-1) = 3$; $df2 = (n-k) = (67- 4) = 63$.

Sehingga nilai F-tabel adalah 2,75.

Berikut hasil dari pengujian Uji F yang dilakukan .

Nilai F tabel pada penelitian ini adalah 2,75. Selanjutnya dilihat nilai F hitung yang diperoleh dari olahan SPSS seperti tabel di bawah ini :

Tabel 11
Hasil Perhitungan Uji-F

Model	Sum of Squares	Df	F	Sig.
1 Regression	426,133	3	11,548	,000 ^b
Residual	774,912	63		
Total	1201,045	66		

Sumber : Data diolah peneliti (2019) menggunakan SPSS v 23

Dari tabel 11 diatas, diperoleh nilai F hitung sebesar $11,548 > F\text{-tabel } 2,75$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000$ dimana nilai signifikannya $< 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H4 diterima, artinya Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah.

Analisa dan Pembahasan

Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa pengaruh kompetensi sumber daya manusia signifikan terhadap kualitas laporan keuangan tidak terbukti. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia dengan signifikansi 0,808 (lihat tabel 4.10). Nilai signifikansi 0,808 lebih besar dari nilai signufikan (α) 0,05. Perhatikan juga bahwa nilai thitung $< t\text{tabel}$, yakni $1.018 < 1,9998$ maka disimpulkan bahwa pengaruh yang terjadi antara SDM dengan variabel kualitas laporan keuangan tidak signifikan secara statistik.

Menurut Delanno dkk (2013) dalam menilai kompetensi SDM dengan melaksanakan sebuah fungsi, termasuk dalam hal menyusun ataupun menyajikan laporan keuangan dapat dilihat dari pengetahuan dan kemampuan khusus yang dimiliki setiap pegawai, pengalaman serta sikap dan tanggung jawab setiap pegawai terhadap tugasnya masing-masing Pengetahuan dan kemampuan setiap pegawai bisa dilihat dari latar belakang pendidikan dan jurusan pegawai dibagian akuntansi/pengelolaan keuangan di OPD Kota Padang Panjang.

Namun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi sumber daya manusia pada bagian pengelolaan keuangan pemerintah di OPD Kota Padang Panjang belum mencukupi bahkan sebagian besar sumber daya manusia pada bagian pengelolaan keuangan tidak memiliki latar pendidikan akuntansi. Sebagaimana yang diketahui dalam pemerintahan untuk menduduki suatu posisi jabatan tidak harus berdasarkan latar belakang pendidikan dan kemampuan yang dimiliki. Menduduki suatu posisi jabatan seringkali hanya berdasarkan pangkat dan golongan yang telah layak tanpa memperhatikan kemampuan dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan posisi jabatan yang diduduki, sehingga SDM bidang keuangan banyak yang kurang memahami prinsip penyusunan laporan keuangan secara teori akuntansi. Namun dengan keterbatasan SDM di bidang keuangan bukan berarti laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang tidak berkualitas, karena sebagian proses dalam penyusunan laporan keuangan telah didukung dengan sistem aplikasi yang telah dirancang sesuai dengan peraturan yang berlaku selain itu dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang selalu dilakukan pendampingan oleh pihak BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) dan Inspektorat demi terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Khoirina Kencana Ningrum (2018) dan Syarifah Hanum Hasibuan (2018) yang menyatakan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sub-bagian pengelolaan keuangan kurang memiliki sumber daya manusia yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elvin Andrianto (2017), Irpan Hutasuhut (2016), Sintike mentari Modo (2015) yang menyatakan Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan

Hasil hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan tidak terbukti. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan signifikansi 0,313 (lihat tabel 4.10). Nilai signifikansi 0,313 lebih besar dari signifikan (α) 0,05 dan nilai thitung < ttabel, yakni $1.018 < 1,9998$, maka disimpulkan bahwa pengaruh yang terjadi antara penerapan SAP dengan variabel kualitas laporan keuangan tidak signifikan secara statistik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD.

Namun hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan daerah berpengaruh tidak signifikan. Hal ini dikarenakan responden pada penelitian ini sebagian besar tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi, sehingga dalam pengisian kuisioner responden kurang memahami pertanyaan yang bersifat teori akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Sejalan dengan hasil penelitian terhadap SDM, penerapan Sumber Daya

manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan secara statistik. tapi dalam kenyataannya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena sebagian besar Standar Akuntansi Pemerintahan ini telah dituangkan dalam Sistem informasi Akuntansi yang dirancang sedemikian rupa sebagaimana diamanatkan dalam PP nomor 56 tahun 2005 yang telah direvisi dengan PP nomor 65 tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syarifah Hanum Hasibuan (2018) yang menyatakan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan oleh. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Angga Dwi Permadi (2013), Junaini (2012) yang menyatakan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan terbukti. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan signifikansi 0,000 (lihat tabel 4.10). Nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari signifikan (α) 0,05 dan nilai thitung > ttabel, yakni $5,194 > 1,9998$, maka disimpulkan bahwa pengaruh yang terjadi antara Sistem Informasi Akuntansi dengan variabel kualitas laporan keuangan signifikan secara statistik

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya semua perangkat yang berhubungan dengan pengelola keuangan daerah di Kota Padang Panjang sudah terintegrasi dalam sebuah jaringan internet yang dipusatkan dalam satu server yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Sehingga dalam pengerjaan dan pelaporan hal ini sangat mendukung tenaga pengelola keuangan dalam melakukan pekerjaan. Sistem Informasi Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan adalah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang mengadopsi prinsip-prinsip akuntansi yang ada pada PP 71 tahun 2010.

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Hasnidar (2016) yang menyatakan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khoirina Kencana Ningrum(2018), Sintike Mentari Modo (2015) yang menyatakan Sistem Informasi Akuntansi dan teknologi berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh Sumber Daya Manusia, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil hipotesis keempat (H4) menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan terbukti. hal ini dapat dilihat dari hasil regresi yang menunjukkan nilai signifikansi 0,000 (lihat tabel 4.11). Nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari signifikan (α) 0,05 dan nilai thitung > ftabel, yakni $11,548 > 2,75$. Serta dari hasil uji R^2 (Koefisien Determinasi) diketahui varians Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem

Informasi Akuntansi dapat menjelaskan Kualitas Laporan Keuangan sebesar 32,4%. Sedangkan sisanya sebesar $100\% - 32,4\% = 67,6\%$ dijelaskan oleh faktor-faktor selain variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya dapat diketahui untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas banyak faktor-faktor pendukung yang dibutuhkan. Walaupun dalam penelitian ini sumber daya manusia dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh tidak signifikan dan hanya Sistem Informasi Akuntansi yang berpengaruh signifikan secara statistik, namun dalam realisasinya ketiga variabel ini tidak dapat dipisahkan untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan penerapan Sistem Informasi Akuntansi yang berbasis teknologi dan mengadopsi prinsip-prinsip akuntansi yang tertuang dalam PP 71 tahun 2010, maka dibutuhkan peran serta sumber daya manusia yang akan mengelola dan mengoperasikan sistem informasi akuntansi tersebut walaupun personilnya bukan berlatar belakang akuntansi tapi mereka dituntut untuk memahami pengelolaan keuangan ini melalui sistem yang telah dirancang. Dengan keadaan ini Pemerintah Kota Padang Panjang memberikan kesempatan dan melakukan pelatihan-pelatihan untuk tenaga pengelola keuangan agar sumber daya manusia bidang keuangan semakin memiliki pengalaman dan pemahaman akuntansi yang baik demi terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisa data pada BAB IV maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang
2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang
3. Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang
4. Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

Keterbatasan Penelitian

Kesadaran peneliti bahwa dalam pembuatan skripsi ini memiliki keterbatasan yaitu:

1. Pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti terbatas pada para pegawai tertentu yang berada di OPD Kota Padang Panjang saja, sehingga hasil penelitian tidak bersifat universal atau mewakili sedikit populasi, keterbatasan ini terjadi karena sedikitnya waktu dan tenaga yang dimiliki oleh peneliti.
2. Peneliti hanya menggunakan tiga variabel bebas yaitu: Sumber Daya Manusia, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi tanpa memasukan variabel independen lainnya.
3. Peneliti menilai kuisioner yang digunakan pada variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintah kurang dipahami karena kuisioner berisi tentang teori akuntansi sedangkan responden tidak semua berlatar belakang pendidikan akuntansi
4. Peneliti tidak menambahkan wawancara sebagai pendukung hasil penelitian.

SARAN

Setelah mengadakan penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Sumber Daya Manusia, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang penulis mencoba memberikan saran yang mungkin dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukkan bagi Pemerintah Kota Padang Panjang dan penelitian selanjutnya yaitu :

A. Bagi Pemerintah Kota Padang Panjang

1. Pemerintah Kota Padang Panjang agar lebih meningkatkan Kualitas Sumber daya manusia yang berkaitan dengan sistem akuntansi Karena walaupun pengelolaan keuangan sudah menggunakan sistem informasi akuntansi yang berbasis teknologi yang cukup baik, tetap dibutuhkan pemahaman teori akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini disebabkan belum semua transaksi dan pencatatan menggunakan aplikasi.
2. Untuk Sistem Informasi Akuntansi yang ada saat ini sudah sangat baik, hanya saja perlu ditingkatkan aplikasi yang bisa langsung menyajikan laporan keuangan daerah berdasarkan transaksi yang diinput saat belanja dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran OPD. Selain itu aplikasi SIPKD yang saat ini digunakan hendaknya bisa langsung menyajikan akuntansi asset yang langsung bisa digunakan dalam penyajian Laporan Keuangan Daerah.
3. Perlunya peningkatan keterlibatan organisasi secara keseluruhan dalam mendukung Pengelolaan keuangan daerah, karena pada beberapa OPD masih kurang perhatian terhadap pengelolaan keuangan dan lebih memfokuskan pada bidang teknis yang dikelola oleh masing-masing OPD terkait.

B. Bagi Penelitian Selanjutnya

1. Penelitian selanjutnya disarankan agar menambahkan variabel independen lainnya yang memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan seperti: Pengawasan Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD).
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan metode survey wawancara untuk hasil yang lebih maksimal

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta, Rineka Cipta
- BPKP. 2014. *Gambaran umum Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah berbasis Akrual sesuai PP No. 71 Tahun 2010 (revisi)*. Jakarta.
- Brookson, S. 2009. *Understanding Accounts*. London: Dorling Kindersley.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga
- Edy Sutrisno, cetakan ketiga, 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Kencana.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi7, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gumanti, Tatang .2011. *Manajemen Investasi- Konsep, Teori dan Aplikasi*, Jakarta, Mitra Wacana Media
- Ikatan Akuntan Publik Indonesia. 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Kasmir. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi 7. Jakrata, Rajawali Pers
- Manguluang, Agussalim. 2016. *Statistik Lanjutan*, Ekasakti Press, Padang
- . 2010. *Metodologi Penelitian*, Ekasakt Press, Padang
- Mardiasmo, 2010. *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta
- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*, Jakarta, Salemba Empat.
- Munawir, Sjadzali. 2015. *Analisis laporan Keuangan*. Edisi 4 Yogyakarta, Liberty
- Ricky Griffin. 2004. *Manajemen*. Jakarta: Gramedia.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- . 2014. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung, Alfabeta.
- . 2018 . *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung, Alfabeta
- Sutrisno. 2012. *Manajemen Keuangan: Teori Aplikasi & Konsep*. Yogyakarta, Ekonisia
- Adriani, Wiwik 2010, Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol5*
- Al-eqab, M. and Adel, D. 2013. The Impact of IT Sophistications on the Perceived Usefulness of Accounting Information Characteristics among Jordanian Listed Companies. *Journal of Bussiness and Social Science*, 4(3), pp: 145-155.
- Alimbudiono, Ria Sandra & Fidelis Arastyo Andono., 2004, Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintaha Daerah “XYZ” dan Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Keuangan daerah Kepada masyarakat Renungan Bagi Akuntan Pendidik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*. Vol. 05 No.02 Hal 18-30
- Delanno, Galuh, F. dan Deviani. 2013. Pengaruh Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Wahana Riset Akuntansi (WRA)*.

- Edison, G., Manuere, F, Joseph, M., and Gutu, K. 2012. Evaluation of Factors Influencing Adoption of Accounting Informasi by Small to Medium Enterprises in Chinhoyi. *Journal of Contemporary Research in Bussiness*, 4(6), pp: 1126-1141.
- Hullah, A.R., Pangemanan,s.,Tangkuman,S. & Budiarmo,N. 2012. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan pada Pemerintahan Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol 3- No.2: pp 9-21
- Karmila, Amries Rusli Tanjung & Edfan Darlis. 2013, Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah daerah Riau). *Jurnal SOROT. Volume 9 No.1 hal 1-121*
- Kusumah Arif Ardi, 2012, Pengaruh Penerapan Sisitem Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada SKPD/ OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya). *Jurnal Accounting. Vo. 1, No.1*
- Santiadji Mustafa, Sutrisno, Rosid.2010. Analisis Faktor – Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktun Pelaporan Keuangan Pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi*.
- Salehi, Mehrdad.,et. al. (2011). Organizational commitment thesis. *Journal of contemporary research in business*, 3(7), 823-851
- Sari, N. (2014). “Penagruh Kapasitas SDM, Pemahaman Akuntansi, Penerapan SAP, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas LKPD.” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNRI*.
- Soudani, Siamak Nejad Hosseini, 2012; *The Usefulness of an Accounting Information System for Effective Organizational Performance; International Journal of Economics and Finance; Vol. 4; p136-145*
- Wati, Kadek Desiana, Nyoman Trisna Herawati dan Ni Kadek Sinarwati. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 2, No. 1, 2014*.
- Yuliani, Safrida, Nadirsyah, dan Usman Bakar. (2010). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Intern Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol.3 No.2* 206-220.
- Zare. F. Bolhari, A., Rezaeean, & A., Bolhari,J., (2012). *The impact of occupational stress on quality of work life among the staff of e-workspace*. *World Academy of Science, Engineering and Technology*, 3 (67): 314-318
- Apri Fajar, 2017, *Faktor Faktor yang Berhubungan Dengan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Di Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Lampung
- Arief Imam Lutfi. 2016. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating*. Skripsi, Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.

- Dita Arfianti, 2011, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi, Universitas Diponegoro
- Donny Andiansyah, 2016. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan (Studi Kasus pada SKPD di Kota Bandar Lampung)* Skripsi Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Angga Dwi Permadi, 2013, *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Bina Marga Jawa Barat*. Skripsi, Universitas Widyatama
- Elvin Andrianto, 2017 *Pengaruh Kapasitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informatika dan SPIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda sebagai Variabel Moderasi (Studi empiris pada SKPD di kabupaten Sleman)*. Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta
- Gusforni, Rosita. 2011. *Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Untuk Menggunakan Sistem Informasi Keuangan daerah Dengan Persepsi Kemanfaatan dan Sikap atas Pengguna Sebagai Variabel Antara (Studi Pada SKPD Kota Solok)*, Skripsi, fakultas Ekonomi Universitas Padang, Padang
- Hasnidar, 2016 *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Instansi Pemerintah Kabupaten Bone*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Irpan Hutasuhut, 2016, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Propinsi di Sumatera Utara*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Medan
- Irvan Ahsani. 2016 *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pengendalian Internal, Serta Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah)".
- Junnaini, Yuli, 2012, *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Kinerja (Survei pada Dinas Kota Bandung)*. Skripsi, Universitas Komputer Indonesia
- Khoirina Kencana Ningrum, 2018, *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Kusuma, Ardi Arif, 2012, *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas laporan Keuangan (Survei pada SKPD/OPD Pemerintah Kota Tasikmalaya)* Skripsi Universitas Siliwangi, Tasikmalaya
- Mirnayanti. 2013, *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin
- Riyadh Al Saddam, 2016, *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah Propinsi Kepulauan Riau*, Skripsi Universitas Riau, Pekanbaru
- Roviyantie, 2011, *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Survei*

- pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya*). Skripsi, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya
- Sihombing, Binsar, 2011, *Pengaruh Penerapan Stand Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas laporan Keuangan Daerah*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia, Jakarta
- Sintike Mentari Modo, 2015, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Informasi Pelaporan Keuangan(Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Talaud*
- Syarifah Hanum Hasibuan, 2018, *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas,*
- Wahyu Ramadhan Kaulan, 2015 *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Keuangan Pemerintah Daerah pada Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jember
- Warismo. 2009. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan daerah Pemerintah Provinsi Jambi,* Tesis, Universitas Sumatera Utara
- Zuliarti. (2012). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi, Universitas Muria Kudus.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah
- , Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- , Petunjuk Teknis SIPKD 2010, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta
- , Situs Resmi Pemerintah Kota Padang Panjang. www.Padangpanjangkota.go.id
- , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- <http://pemerintah.net/sistem-pengendalian-intern-pemerintah/>
- www.google.scholar.com